

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap jenis dan tempat pekerjaan baik pada pekerja formal maupun informal memiliki risiko yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pada umumnya, para pekerja sektor informal kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya di lingkungan kerjanya. Kesadaran dan pengetahuan akan berbagai potensi bahaya dari pekerjaan, kondisi, bahan dan peralatan di tempat kerja sangat minim sehingga sangat rentan untuk terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Kemenkes RI, 2016). Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pada data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 terdapat 114.000 kasus kecelakaan kerja, tahun 2020 terjadi peningkatan pada rentang Januari hingga Oktober 2020 BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 177.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia (Menaker RI, 2021).

Penguatan dan kompetensi SDM Puskesmas dan Rumah Sakit dalam bidang Kesehatan Kerja dan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja dilakukan agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat melayani kesehatan pekerja secara holistik baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2019).

Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Salah satu azas pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam arti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam

penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah upaya kesehatan kerja atau Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) (Kemenkes RI, 2004).

Puskesmas sebagai pelaksana upaya kesehatan masyarakat diwilayahnya memiliki tanggung jawab dalam pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Program kesehatan kerja salah satunya dalam peningkatan kapasitas kesehatan pekerja adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Penerapan upaya kesehatan kerja pada pekerja sektor informal dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat pekerja melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). (Kemenkes RI, 2018).

Penilaian program pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) menurut Permenkes No. 100 Tahun 2015 adalah jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau Masyarakat, frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif, adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas program dan lintas sector, adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader, frekuensi pembinaan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali per Pos UKK Terintegrasi (Kemenkes RI, 2015).

Menurut data direktorat pelayanan Kesehatan primer data Pos UKK di Indonesia sejak tahun 2015-2018 mengalami penambahan. Pada tahun 2015 sebanyak 243 Pos UKK, 2016 sebanyak 374, 2017 sebanyak 482 dan 2018 sebanyak 516 Pos UKK (Kemenkes RI, 2018). Dengan demikian rata-rata kenaikan setiap tahunnya dari 2015-2018 kenaikannya sebanyak 22%. Berdasarkan capaian kinerja kegiatan direktorat Kesehatan kerja olahraga tahun 2019 jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah puskesmas sebanyak 7289 Pos UKK dari rencana target 1620 Pos UKK. Data ini meningkat 77% dari rencana target Pos UKK. Dengan adanya data ini belum adanya pengukuran kinerja kegiatan kesehatan kerja yang mengarah pada *outcome* atau dampak sehingga elemen keberhasilan Pos UKK perlu dilakukan survei atau penelitian lagi (Kemenkes RI, 2019).

Namun, Faktor yang masih menjadi penghambat pencapaian indikator adalah Jumlah yang besar dan terdistribusinya sasaran pekerja sektor

informal, Jam kerja pekerja sektor informal yang sangat mempengaruhi penghasilan ekonomi, Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang tidak singkat hingga terbentuk Pos UKK (Kemenkes RI, 2019).

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni Penerapan Pos Upaya kesehatan Kerja (UKK) pada sektor informal di wilayah kerja Puskesmas Bergas masih belum optimal karena rata-rata persentase indikator yang sesuai sebesar 22,5%, artinya belum ada setengah poin-poin indikator yang dilaksanakan. Faktor penghambat dalam penerapan kegiatan Pos Upaya kesehatan Kerja (UKK) antara lain masih adanya jumlah pekerja kurang dari 10 orang, kurangnya kemampuan dan keaktifan kader Pos UKK dalam menjalankan kegiatan UKK, kurangnya dukungan *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan UKK, belum adanya kepengurusan Pos UKK, pengelola Pos Upaya kesehatan Kerja (UKK) tidak bisa fokus melaksanakan satu program karena banyaknya tugas yang dikerjakan dan masih ada kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Pos UKK (Wahyuni, 2020).

Menurut data di Jawa Barat terdapat 9 Pos UKK dari target sasaran puskesmas sebanyak 1069 puskesmas hanya ada 693 Puskesmas yang aktif melakukan kegiatan Kesehatan kerja dasar. Sejak ditetapkan 1 Pos UKK wajib dikelola oleh Puskesmas Tahun 2018 seharusnya diperlukan penilaian terhadap outcome atau dampak pada pembentukan UKK (Kemenkes RI, 2019). Kota Bekasi terdapat 19 Pos UKK dari 9 puskesmas. Dengan data sebagai berikut Puskesmas Jatibening Baru ada 3 Pos UKK.

Puskesmas Jatibening Baru termasuk yang memiliki Pos UKK yang ada di Jawa Barat. Pos UKK ini sangat diperlukan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kerja dasar untuk pekerja informal di Jatibening Baru. Berdasarkan data dinas Kesehatan pusat kota Bekasi, Puskesmas Jatibening Baru memiliki jumlah Pos UKK dan jumlah pekerja paling banyak dikarenakan sebagian wilayahnya adalah sektor industri informal. Berdasarkan data tersebut terdapat 3 Pos UKK yang terdiri dari Jenis usaha Sablonan dan Pematangan Ayam yang berdiri pada Tahun 2010

dengan total jumlah anggota pekerja 70 orang dengan 6 orang kader dan usaha pengolahan garam pada Tahun 2019.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan wawancara petugas puskesmas dan kader, diperoleh bahwa persyaratan pembentukan UKK yang terdiri dari 1 Pos UKK terdapat 2 orang kader yang dipilih dari bagian karyawan pabrik sekaligus bagian dari ketenagaan dalam program Pos UKK ini namun belum pernah mendapat pelatihan, Para kader tidak aktif dalam menjalankan perannya, dan tidak adanya laporan kegiatan dan komunikasi ke Pos UKK. Belum terpenuhinya prasarana, pendanaan berasal dari anggaran dasar puskesmas dan dana sehat pekerja (iuran) namun tidak berjalan. Pencatatan kegiatan Pos UKK tidak memiliki buku pendaftaran dan pelaporan kegiatan tidak dilakukan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh dokter selaku penanggung jawab dan pemegang program setiap sebulan sekali namun belum adanya pembinaan kelembagaan dari tingkat kelurahan. Semua hal diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di puskesmas jatibening baru belum optimal.

Dari data laporan kunjungan Desember tahun 2020 Puskesmas Wilayah Jatibening Baru masih ditemukan pelayanan pekerja sakit yang dilayani sebanyak 22 orang, kasus penyakit umum pada pekerja sebanyak 17 orang, dan kasus penyakit akibat kerja sebanyak 5 orang namun tidak disebutkan jenis penyakitnya dari formulir laporan bulanan kesehatan pekerja.

Puskesmas Jatibening Baru berupaya Pos UKK tetap aktif dengan adanya kegiatan pembinaan satu bulan sekali kepada anggotanya dan dengan adanya program Pos UKK diharapkan dapat mencegah kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun, masih adanya kejadian penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan tercapainya program Pos UKK tidak optimal di Puskesmas, bagi tenaga kerja dapat terus meningkat angka kejadian penyakit akibat kerja sehingga masyarakat tidak dapat bekerja dengan produktif. Data Primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam dan hasil observasi. Dikarenakan dalam masa pandemi, wawancara mendalam akan dilakukan melalui pertemuan virtual (*zoom meeting*) dan

observasi dilakukan dengan tatacara protokol Kesehatan. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari hasil telaah dokumen. Peneliti akan menginformasikan dokumen yang diperlukan dan dikirim *email* oleh pembimbing lapangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang “Gambaran Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan wawancara kepada petugas Puskesmas Jatibening Baru dan kader, terdapat 2 orang kader yang dipilih dari bagian karyawan pabrik sekaligus bagian dari ketenagaan dalam pelaksanaan Pos UKK ini namun belum pernah mendapat pelatihan, para kader kurang aktif dalam menjalankan perannya, dan tidak adanya laporan kegiatan dan komunikasi ke Pos UKK. Belum terpenuhinya prasarana. Pos UKK tidak memiliki buku catatan kegiatan. Belum adanya pembinaan kelembagaan dari tingkat kelurahan. Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru belum berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan penelitian.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?
- 1.3.2 Bagaimana Gambaran Persyaratan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?
- 1.3.3 Bagaimana Gambaran Sistem Rujukan Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?
- 1.3.4 Bagaimana Gambaran Ketenagaan Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?
- 1.3.5 Bagaimana Gambaran Sarana Prasarana Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?
- 1.3.6 Bagaimana Gambaran Pendanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?

1.3.7 Bagaimana Gambaran Pencatatan dan Pelaporan Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?

1.3.8 Bagaimana Gambaran Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pada Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

##### 1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021

##### 1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran Persyaratan Pembentukan Pos UKK di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
2. Mengetahui Gambaran Sistem Rujukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
3. Mengetahui Gambaran Ketenagaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
4. Mengetahui Gambaran Sarana Prasarana Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
5. Mengetahui Gambaran Pendanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
6. Mengetahui Gambaran Pencatatan dan Pelaporan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.
7. Mengetahui Gambaran Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### 1.5.1 Bagi Puskesmas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) agar lebih optimal

#### 1.5.2 Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan wawasan keilmuan khususnya penelitian dibidang Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) untuk selanjutnya perlu dikembangkan dalam penelitian yang lebih komprehensif.

#### 1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya demi perkembangan ilmu dalam melakukan analisis ketenagaan, kegiatan, sarana dan prasarana, pencatatan dan pelaporan dan dana terhadap pelaksanaan Pos Upaya kesehatan Kerja (UKK).

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi Tahun 2021 yang akan dilakukan di Puskesmas Jatibening Baru Kota Bekasi dimulai bulan September 2021 sampai Januari 2022. Penelitian ini dilakukan karena kader yang bertugas belum pernah mendapat pelatihan, para kader kurang aktif dalam menjalankan perannya, dan tidak adanya laporan kegiatan dan komunikasi ke Pos UKK. Belum terpenuhinya prasarana. Pos UKK tidak memiliki buku catatan kegiatan. Belum adanya pembinaan kelembagaan dari tingkat kelurahan. Dalam penelitian ini melibatkan 6 orang informan yakni Informan kunci yaitu Kepala Puskesmas dan kepala bagian program UKK. Informan utama yaitu orang petugas pelaksana Pos UKK dan Ketua Kader pelaksana Pos UKK, informan pendukung yaitu 2 (dua) anggota kader pelaksana Pos UKK. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.